

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

- Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darus, Mariam, 2005, *KUH Perdata Buku III
Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di
Era Global*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. I, Citra Aditya
Bakti, Jakarta
- HS, Salim, 2008, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,
Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Cet. V, Kencana,
Jakarta
- Nawawi, Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju,
Bandung

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada,
Jakarta

Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang
Lahirdari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya, Bandung

Simorangkir, JCT dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Cet. VIII, Sinar Grafika,
Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI
Press, Jakarta

Sofyan, Sri Soedawi Masychoen, 1975, *Hukum Perutangan Bagian A,
Seksi Hukum UGM*, Yogyakarta

Soemitro, Ronny Hanitio, 1990 *Metodelogi Penelitian Hukum dan
Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta

Yescombe, E.R., 2007, *Public Private Partnerships: Principles of Policy
and Finance*, 1st Edition, Elsevier Ltd., Oxford

2. Makalah.

Negoro, Nugroho Priyo, “Model Optimasi Masa Konsesi Proyek
Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Memaksimumkan Kinerja
Pihak yang Bekerjasama”, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi
Sarana Wilayah, Surabaya, 2011, ISBN :978-979-18342-3-0

3. Artikel atau Jurnal.

Asikin, Zainal, “Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013

Hartono, “Bentuk Kerjasama Public-Private Pembangunan Graving Dock Dan Manajemen Galangan Kapal Dengan Metode Analytical Hierarchi Process (AHP)”, *Jurnal TEKNIK*, Vol. 34 No.1 Tahun 2013, ISSN 0852-1697

Kerf, Michelet *al.*, “Concessions for Infrastructure - A Guide to Their Design and Award”, *World Bank Technical Paper No. 399, Finance, Private Sector, and Infrastructure Network*, Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank, 1998

4. Majalah dan Penerbitan Umum

Bappenas, Infrastructure Reform Sector Development Program, 2013, “Editorial & Redaksi”, *Majalah Sustaining Partnership*, Edisi Agustus 2013, hal 2.

_____, “Kebijakan Terpadu Pengembangan Pelabuhan”, *ibid*, hal 4

- _____, “Pembenahan Regulasi Kepelabuhanan”, *ibid*, hal 23-24
- _____, 2012, “Editorial & Redaksi”, *Majalah Sustaining Partnership*,
Edisi Khusus Konektivitas Desember 2011, hal 2
- _____, 2011, “Membangun Pelabuhan Indonesia”, *Majalah Sustaining
Partnership*, Edisi Khusus Pelabuhan 2011, hal 4-5
- _____, 2016, “Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016”, PT
Krakatau Bandar Samudera
- Danang Parikesit, 2013, “Pemerintah Harus Mendorong KPS Pelabuhan”,
Majalah Sustaining Partnership, *op.cit.*, hal. 24-25.
- Kemenko Perekonomian, 2010, *Kerjasama Pemerintah dan Swasta :
Panduan Bagi Investor dalam Investasi di Bidang Infrastruktur*,
April 2010
- Kementerian Perhubungan, 2013, *Statistik Perhubungan 2012*

5. Disertasi / Tesis / Skripsi

- Disertasi dari Iwan Erar Joesoef pada Program studi Doktor Ilmu Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, *Model Kerjasama Pemerintah
dan Swasta : Studi Penerapan Kontrak Build Operate Transfer
dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia*
- Tesis dari Rina Kartika Sari pada Program studi Magister Kenotariatan,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, *Klausula imbalan dalam*

perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta: Studi kasus perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta

Tesis dari Nugroho Priyo Negoro pada program studi Magister Teknik Sipil, ITS, Surabaya, 2011, *Pemodelan Masa Konsesi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Mengoptimalkan Kinerja Bersama pada Sektor Penyediaan Air Minum*

Tesis dari Hartono pada Program studi Magister Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, *Peluang Kerjasama Pemerintah – Swasta Pada Pembangunan Graving Dock Dan Pengelolaan Galangan Kapal : Studi Kasus PT Janata Marina Indah Tanjung Emas Semarang*

6. Internet.

American Association of Port Authority, “World Port Rankings 2010”, <http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%202010.pdf>, 4 Mei 2014

American Association of Port Authority, “World Port Rankings 2011”, <http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%202011.pdf>, 4 Mei 2014

Agoes, Nasdion, “Deregulasi Kepelabuhanan Indonesia”, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACU427.pdf, 4 Mei 2014

- Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Konsesi”,
<http://kbbi.web.id/konsesi>, 1 Mei 2014
- Berita Moneter, “Cegah Timbul “Geger Bbm”, PP 11/2015 Harus
Direvisi”, <http://www.beritamometer.com/cegah-timbul-geger-bbm-pp-112015-harus-direvisi/>, 31 Januari 2016
- Berita Trans, “PP No.11/2015 Tak Logis Dan Picu Harga Bbm Tertinggi
Di Dunia”, <http://beritatrans.com/2015/03/27/pp-no-112015-tak-logis-dan-picu-harga-bbm-tertinggi-di-dunia/>, 31 Januari 2016
- Detik Finance, “Revisi UU Pelayaran Tutup Peluang Monopoli Pelindo”,
<http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/03/tg/1/27/time/133037/idnews/566193/idkanal/4>, 4 Mei 2014
- Jurnal Maritim, “Kemenhub dan Tiga Pelindo Tekan Konsesi Pelabuhan,
Pelindo II Menyusul”, <http://jurnalmaritim.com/2015/11/kemenhub-dan-tiga-pelindo-tekan-konsesi-pelabuhan-pelindo-ii-menyusul/>, 9
November 2015
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Draft Pedoman Pasal 15 tentang
Perjanjian Tertutup”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup/>, 31 Januari 2016
- Maritime Media, “Pelindo II Lakukan Tandatanganan Susulan Perjanjian
Konsesi Pelabuhan”,
<http://www.diandev.com/maritimedia/2015/11/12/pelindo-ii-lakukan-tandatanganan-susulan-perjanjian-konsesi-pelabuhan/>, 12
November 2015
- Prasetyo, Irwan, “Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan
Perkotaan”,
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/kerjasama%20%2010.pdf, 4 Mei 2014

- PT Pelabuhan Indonesia II, “Kinerja Operasional”, Laporan Tahunan 2010, <http://www.indonesiaport.co.id/read/operational-performance.html>, 4 Mei 2014
- PT Pelabuhan Indonesia 2 (Persero), “Laporan Tahunan 2012”, http://www.indonesiaport.co.id/download/annual_report_2012.pdf, 4 Mei 2014
- PT Jasa Marga Persero, “Laporan Tahunan 2012”, , <http://www.jasamarga.com/download/Annual%20Report%20Jasa%20Marga%202012.pdf>,
- Puskompublik Dephub, “Investasi Asing Di Usaha Kepelabuhanan Maksimal 49 %”, <http://kemhubri.dephub.go.id/id/index2.php?module=news&act=view&id=NDY2>, 4 Mei 2014
- Wikipedia, “Indonesia”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, 4 Mei 2014
- Wikipedia, “Penerimaan Negara BukanPajak”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, 29 September 2015

7. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan,

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2012 Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.57 Tahun 2015 tentang Pemanduan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.6 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.15 Tahun 2014 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.15 Tahun 2015 jo. PM.166 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Perjanjian dalam Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.51 Tahun 2015 tentang Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.69 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 003/1/11-Phb Tahun 2011, tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terhadap PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. KU.404 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.433 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten untuk menunjang kegiatan di bidang industri baja PT Krakatau Steel (Persero).

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.309 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Krakatau Bandar Samudera sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.461 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten untuk menunjang Kegiatan Usaha di bidang industri baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.